

NOTULA

Pembahasan Awal Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) Periode 2020-2022

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Senin 24 Agustus 2020

Pukul : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting Room

Agenda : 1. Paparan Usulan RAN OGI 2020-2022 dari Yayasan Tifa
2. Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022

Peserta : 1. Tim Sekretariat Nasional OGI
2. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, Bappenas
3. Tim Yayasan TIFA dan Japan Initiatives

II. Pembahasan

1. Senior Program Officer Yayasan TIFA menyampaikan paparan mengenai Program Review yang merupakan pendekatan evaluasi program pembangunan berbasis masyarakat, sebagai berikut:
 - a. Pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan agar masyarakat memperoleh pemahaman akan pemanfaatan anggaran pembangunan.
 - b. Program Review mendorong metode evaluasi program pembangunan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Model ini merupakan model evaluasi program yang diterapkan di Jepang dan berorientasi pada *output/outcome* program serta berdasarkan pada asas keterbukaan.
 - c. Pelaksanaan Program Review dimulai dengan penentuan lokasi dan program pembangunan yang akan dievaluasi. Kemudian evaluator

yang akan terlibat juga ditentukan, misalnya masyarakat, akademisi, PNS, dan tenaga ahli dari luar program. Proses evaluasi berdasarkan lembar program yang sudah ditetapkan yang kemudian dievaluasi. Penerima manfaat dari program review adalah masyarakat dan pemerintah karena program ini bertujuan untuk meningkatkan layanan dan meningkatkan keterbukaan.

- d. Rencana implementasi Program Review dalam RAN OGI 2020-2022 di tahun 2021 berfokus pada pengenalan Program Review kepada kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan tenaga ahli. Pengenalan ini kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan *pilot project* di beberapa daerah. Terkait lokasi yang akan dievaluasi dan menjadi *pilot project*, Yayasan TIFA belum menentukan. Saat ini Yayasan TIFA fokus kepada metode yang dikembangkan agar dapat diterapkan di desa di Indonesia. Program yang akan dievaluasi juga belum ditentukan, namun berdasarkan rekomendasi berbagai pihak, baiknya program yang akan dievaluasi adalah di tingkat desa karena desa memiliki otonomi anggaran untuk melanjutkan atau menghentikan program. Dengan kata lain, *scope* dari Program Review menyasar program-program yang ada desa dan menggunakan APBDDes. *Tools* Program Review ini akan bersifat sederhana dan memberi ruang pelibatan masyarakat.
 - e. Yayasan TIFA menjelaskan bahwa pendanaan Program Review merupakan kerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jepang. Yayasan TIFA akan berkolaborasi dengan Japan Initiative selaku CSO dari Jepang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan Program Review di Jepang.
2. Kepala Subdit Perdesaan, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan menyampaikan beberapa poin tanggapan sebagai berikut:
- a. Pemerintah fokus pada dampak program yang selama ini belum terjamah. Misalnya, pemerintah menerapkan P3PD (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) yakni program jangka menengah yang dampaknya ingin dievaluasi. Program Bumdes juga bisa menjadi pilihan. Namun, evaluasi saat ini hanya di level *output* yakni seberapa besar penyerapan dan berapa target tercapai.

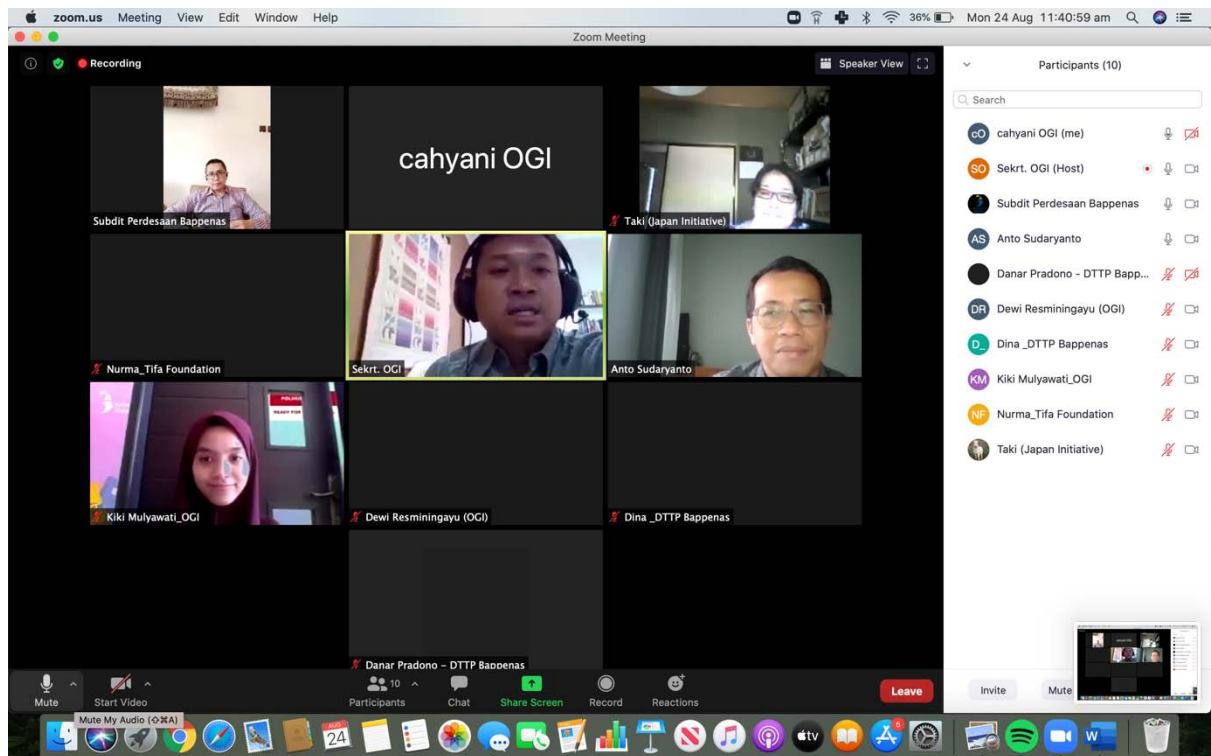
Misalnya, program pelatihan masyarakat di desa sudah ada mekanisme evaluasi yang hanya melacak *output* dan bukan *impact*. Jadi, pemerintah tidak mengetahui apakah orang yang dilatih ini bisa menularkan ilmunya dan apakah bisa menjadi *agent of change*.

- b. Pemerintah ke depannya ingin melihat indeks pembangunan yang bisa mencerminkan dampak. Namun, indeks desa ini bersifat generik dan tidak spesifik melihat tingkat partisipasi. Indeks ini hanya akan melihat seberapa jauh pembangunan desa terlaksana. Misalnya, evaluasi akan melihat apakah terjadi peningkatan kapasitas desa karena program ini melalui *randomize evaluation*, yang khusus melihat dampak P3PD bukan karena PKH dari Kementerian Sosial atau program lainnya.
- c. Selain *randomize evaluation*, ada metode makro yakni survey. Saat ini Pemerintah juga mengembangkan metode studi kasus agar terlihat signifikansi perubahan dalam konteks mikro. Kelemahannya, *case study* tidak bisa digeneralisasi seperti hasil makro.
- d. Beberapa program prioritas pemerintah terkait dengan pembangunan desa diantaranya adalah program desa inklusif dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Usulan dari Yayasan TIFA terkait Program Review dapat disinergikan program-program prioritas tersebut. Salah satunya adalah bagaimana melihat dampak program peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam sebuah studi kasus. Pemilihan desa yang akan menjadi pilot project Program Review dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Desa PDTT.

III. Tindak Lanjut

1. Sekretariat OGI akan memfasilitasi rapat pembahasan lanjutan antara Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan TIFA. Rapat pembahasan lanjutan ini bertujuan mengidentifikasi kegiatan yang dapat dikolaborasikan serta menajamkan usulan terkait Program Review dalam RAN OGI 2020-2022.

IV. Dokumentasi



(Screenshoot Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022 terkait Program Review)